



*Rudy C Tarumingkeng: Keberagaman Budaya Nusantara sebagai
Modal Sosial bagi Pembangunan Negara*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

9 Maret 2026

KEBERAGAMAN BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI MODAL SOSIAL BAGI PEMBANGUNAN NEGARA

Pendahuluan

Indonesia sering dipahami pertama-tama sebagai negara besar dalam arti geografis, demografis, dan politik. Namun, sesungguhnya kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada luas wilayahnya atau jumlah penduduknya, melainkan juga pada kemampuan bangsa ini memelihara kehidupan bersama di tengah keberagaman yang sangat kaya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2020 mencapai 270.203.917 jiwa, sementara BPS juga menunjukkan bahwa pengelompokan data etnis dari SP2010 menghasilkan 633 kelompok suku besar; pada saat yang sama, Badan Bahasa menyebut terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia dan 114 di antaranya telah direvitalisasi hingga 2024. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan penanda bahwa Indonesia adalah ruang pertemuan banyak identitas, memori, pengetahuan, nilai, dan cara hidup yang hidup berdampingan. (sensus.bps.go.id)

Dalam konteks itulah, pembicaraan mengenai pembangunan negara tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai kebudayaan. Konstitusi Indonesia sendiri tidak menempatkan kebudayaan sebagai unsur pinggiran. Pasal 32 UUD 1945 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan

mengembangkan nilai budayanya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menegaskan bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Bahkan, undang-undang itu memandang pemajuan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sekadar beban biaya. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Pernyataan normatif tersebut penting, sebab dalam praktik pembangunan modern sering muncul kecenderungan melihat budaya hanya sebagai ornamen: sebagai festival tahunan, pertunjukan seremonial, atau dekorasi pariwisata. Padahal, budaya bekerja jauh lebih dalam. Ia membentuk cara orang saling percaya, bekerja sama, mematuhi norma, menyelesaikan konflik, merawat lingkungan, menghormati otoritas, dan membayangkan masa depan bersama. Dengan kata lain, budaya bukan hanya warisan simbolik; budaya adalah energi sosial yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan, kualitas partisipasi warga, serta kemampuan suatu bangsa mengelola perubahan. Di sinilah keberagaman budaya Nusantara dapat dipahami sebagai modal sosial yang amat penting bagi pembangunan negara. ([UNESCO](#))

Secara konseptual, modal sosial merujuk pada jaringan, norma, nilai bersama, dan kepercayaan yang memudahkan kerja sama di dalam atau antar kelompok. OECD, sebagaimana digunakan dalam standar analisis pemerintah Inggris, mendefinisikannya sebagai jaringan bersama norma, nilai, dan pemahaman yang memfasilitasi kerja sama; dimensi pokoknya mencakup hubungan personal, dukungan jaringan sosial, keterlibatan sipil, serta kepercayaan dan norma kooperatif. Literatur Bank Dunia juga menegaskan bahwa modal sosial berpengaruh pada hasil-hasil pembangunan seperti pertumbuhan, pemerataan, dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, apabila budaya menumbuhkan kepercayaan, solidaritas, dan kesediaan bekerja bersama, maka budaya

sesungguhnya menghasilkan modal sosial yang relevan langsung bagi pembangunan. (analysisfunction.civilservice.gov.uk)

Esai ini berargumen bahwa keberagaman budaya Nusantara merupakan salah satu fondasi paling penting bagi pembangunan negara Indonesia, justru karena dari keberagaman itu lahir modal sosial yang menopang kohesi nasional, partisipasi warga, inovasi lokal, ekonomi kreatif, diplomasi budaya, serta ketahanan masyarakat menghadapi krisis. Namun, potensi itu tidak otomatis bekerja. Ia perlu diakui, dipelihara, diinstitusikan, dan dihubungkan secara cerdas dengan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, tugas negara bukan menyeragamkan budaya, melainkan mengubah keberagaman budaya menjadi kekuatan kolektif yang produktif dan berkeadilan. ([Indonesian Defense Ministry](#))

1. Memahami kebudayaan dan modal sosial dalam konteks pembangunan

Kebudayaan dalam pengertian yang luas mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pengertian ini termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Artinya, kebudayaan tidak terbatas pada tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional, tetapi juga mencakup cara hidup, pengetahuan lokal, teknologi tradisional, bahasa, nilai gotong royong, tata hubungan sosial, sampai kebiasaan bermusyawarah. Platform data kebudayaan Kemendikbud juga menunjukkan bahwa Warisan Budaya Takbenda mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemahaman yang luas ini penting karena pembangunan negara menyentuh semua ranah kehidupan yang juga disentuh oleh budaya. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Sementara itu, modal sosial berbeda dari modal fisik atau modal finansial. Jalan raya, pelabuhan, pabrik, dan jaringan digital adalah modal fisik; dana investasi dan anggaran adalah modal finansial; pendidikan

dan keterampilan adalah modal manusia. Adapun modal sosial berada pada kualitas hubungan di antara manusia. Sebuah desa yang miskin secara finansial bisa tetap tangguh ketika warganya saling percaya dan terbiasa bergotong royong. Sebaliknya, sebuah kota yang kaya investasi dapat tetap rapuh apabila hubungan antarkelompok penuh kecurigaan, elitisme, atau konflik berkepanjangan. Karena itu, pembangunan yang hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi, tanpa membangun modal sosial, sering menghasilkan kemajuan yang tampak di permukaan tetapi rapuh di dalam. (analysisfunction.civilservice.gov.uk)

Dalam banyak kajian, modal sosial biasanya dipahami memiliki sedikitnya tiga bentuk: **bonding**, yaitu ikatan yang menguatkan solidaritas dalam kelompok; **bridging**, yaitu jembatan yang menghubungkan kelompok yang berbeda; dan **linking**, yaitu hubungan warga dengan lembaga yang memiliki otoritas atau sumber daya lebih besar. Kerangka ini sangat berguna untuk membaca Indonesia. Di satu sisi, hampir semua kelompok budaya memiliki mekanisme internal untuk membangun bonding: rasa kekeluargaan, norma saling membantu, dan kesetiaan pada komunitas. Di sisi lain, pembangunan negara memerlukan bridging agar perbedaan suku, agama, bahasa, dan wilayah tidak menjadi jurang, melainkan jembatan kerja sama. Selanjutnya, pembangunan yang efektif menuntut linking, yaitu hubungan kepercayaan antara komunitas dan negara. Kebudayaan dapat menguatkan ketiganya sekaligus. (analysisfunction.civilservice.gov.uk)

UNESCO menekankan bahwa budaya tidak boleh dipandang sebagai domain kebijakan yang terisolasi, melainkan sebagai dimensi lintas sektor yang dapat memperbarui kebijakan agar lebih inklusif, berpusat pada manusia, dan relevan dengan konteks. Pandangan ini sejalan dengan realitas Indonesia. Program kesehatan akan lebih efektif jika memahami bahasa dan kebiasaan lokal; kebijakan pendidikan akan lebih berhasil jika menghargai budaya belajar komunitas; pembangunan desa akan lebih berkelanjutan jika selaras dengan struktur sosial dan

pengetahuan setempat. Jadi, ketika budaya diletakkan di pusat pembangunan, yang terjadi bukan romantisasi masa lalu, melainkan peningkatan relevansi sosial dari kebijakan publik. ([UNESCO](#))

Dari sini dapat ditegaskan bahwa keberagaman budaya Nusantara bukan hambatan bagi pembangunan, melainkan reservoir nilai dan institusi sosial yang dapat diaktifkan untuk tujuan pembangunan. Ia menjadi hambatan hanya jika dikelola secara buruk: ketika negara tidak adil, ketika stereotip antarkelompok dibiarkan, atau ketika budaya direduksi menjadi simbol kosong tanpa memberi manfaat bagi pemiliknya. Dengan manajemen kebijakan yang tepat, budaya dapat menjadi sumber legitimasi, kreativitas, disiplin kolektif, dan keberdayaan masyarakat. ([Indonesian Defense Ministry](#))

2. Keberagaman budaya Indonesia: lanskap yang melahirkan kekayaan sosial

Keberagaman Indonesia tidak muncul secara kebetulan. Ia terbentuk oleh sejarah panjang migrasi, perdagangan, kerajaan, kolonialisme, perjumpaan agama, interaksi maritim, dan dinamika antarpulau. Karena itu, identitas budaya Indonesia bersifat berlapis: seseorang bisa menjadi anggota suku tertentu, warga daerah tertentu, penganut agama tertentu, sekaligus warga negara Indonesia. Struktur identitas berlapis ini sesungguhnya merupakan sumber elastisitas sosial. Orang belajar hidup dengan banyak lingkaran identitas sekaligus. Bila dikelola dengan baik, kemampuan hidup di antara banyak identitas ini melahirkan sikap adaptif, toleran, dan terbuka terhadap kolaborasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

BPS menekankan bahwa Indonesia memiliki ratusan nama suku, bahkan ribuan bila dirinci sampai subsuku, dan klasifikasi SP2010 menghasilkan 633 kelompok suku besar. BPS juga mencatat tingkat heterogenitas etnis Indonesia sangat tinggi, meskipun tidak terpolar secara ekstrem. Temuan ini penting. Ia menunjukkan bahwa kemajemukan Indonesia bukan

sekadar slogan politik, tetapi fakta demografis yang konkret.

Pembangunan Indonesia, oleh karena itu, selalu berlangsung di dalam masyarakat yang majemuk. Setiap kebijakan nasional—pendidikan, kesehatan, pangan, tata ruang, ekonomi digital, bahkan pelayanan administrasi—akan berinteraksi dengan struktur budaya yang tidak tunggal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada saat yang sama, keragaman bahasa memperlihatkan betapa kaya jagat pengetahuan Nusantara. Menurut Badan Bahasa, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, dan program revitalisasi bahasa daerah hingga 2024 telah menjangkau seluruh provinsi, dengan 114 bahasa daerah direvitalisasi. Fakta ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, bahasa adalah gudang memori budaya, pengetahuan ekologis, humor, sastra, dan identitas komunitas. Kedua, bahasa daerah juga rapuh jika tidak diwariskan. Karena itu, menjaga keragaman budaya bukan sekadar menjaga estetika, tetapi menjaga medium sosial yang memungkinkan transfer nilai dan pengetahuan lintas generasi. ([Kemendikdasmen](#))

Di tingkat internasional, pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya takbenda Indonesia juga memperlihatkan kekayaan dan keluasan spektrum budaya Nusantara. Pada laman resmi UNESCO per Maret 2026, Indonesia memiliki 16 elemen yang terinskripsi, termasuk batik, wayang, angklung, tari tradisional Bali, noken Papua, pinisi Sulawesi Selatan, pencak silat, gamelan, jamu, Reog Ponorogo, kolintang, kebaya, dan pantun. Pengakuan ini penting bukan karena validasi asing semata, tetapi karena menunjukkan bahwa banyak unsur budaya Indonesia memiliki nilai universal sekaligus potensi sosial-ekonomi yang besar bila dikelola dengan bermartabat. ([ICH UNESCO](#))

Namun, yang lebih penting daripada daftar warisan itu adalah makna sosial di baliknya. Batik, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan tekstil, melainkan dengan simbol, pendidikan, kerja kerajinan, dan identitas. UNESCO bahkan menyoroti bahwa batik meresap ke dalam siklus hidup

orang Indonesia. Begitu pula jamu tidak hanya berkaitan dengan ramuan, tetapi dengan pengetahuan kesehatan berbasis komunitas; pinisi tidak hanya tentang kapal, tetapi juga tentang keterampilan, kerja tim, dan tradisi maritim; noken tidak hanya tentang tas anyaman, tetapi juga tentang relasi sosial dan cara hidup masyarakat Papua. Dengan demikian, unsur budaya bukan benda mati, melainkan simpul kehidupan sosial. ([ICH UNESCO](#))

3. Budaya sebagai penghasil kepercayaan, norma, dan kerja sama

Mengapa budaya dapat menjadi modal sosial? Jawabannya terletak pada kemampuan budaya membentuk perilaku kolektif. Dalam kehidupan sosial, orang tidak mungkin setiap saat berinteraksi hanya melalui kontrak formal dan pengawasan negara. Masyarakat berjalan sehari-hari melalui kebiasaan, norma tak tertulis, rasa malu, rasa hormat, kesantunan, dan keyakinan bahwa orang lain juga akan bertindak pantas. Semua ini adalah produk budaya. Jika masyarakat memiliki norma timbal balik yang kuat—misalnya membantu tetangga saat musibah, terlibat dalam kerja bakti, atau ikut menjaga fasilitas umum—maka biaya sosial untuk menyelesaikan banyak persoalan menjadi jauh lebih rendah. Itulah modal sosial dalam bentuk yang paling nyata.

(analysisfunction.civilservice.gov.uk)

Dalam masyarakat Nusantara, banyak nilai budaya secara tradisional menguatkan norma timbal balik dan solidaritas. Kita mengenalnya dalam aneka istilah lokal yang berakar pada prinsip gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, dan saling menanggung beban. Meskipun namanya berbeda-beda di tiap daerah, logika moralnya serupa: manusia hidup tidak sendirian, dan kesejahteraan bersama memerlukan kontribusi setiap orang. Nilai seperti ini amat penting bagi pembangunan, terutama pada level komunitas. Infrastruktur desa, pengelolaan air, kebersihan lingkungan, keamanan kampung, sampai penyelenggaraan ritual komunal sering kali berjalan karena ada norma

partisipasi, bukan semata karena paksaan administratif. Kerja sama menjadi “masuk akal” karena didukung budaya. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Di sinilah budaya menghasilkan **bonding social capital**. Ia menumbuhkan rasa “kita” di dalam komunitas. Rasa memiliki itu membuat warga bersedia berkorban bagi kepentingan bersama, menjaga nama baik kelompok, dan melindungi mereka yang rentan. Dalam pembangunan, bonding penting karena menciptakan daya tahan sosial. Saat terjadi bencana, krisis ekonomi, atau kegagalan panen, masyarakat dengan ikatan kuat biasanya lebih cepat saling menolong sebelum bantuan formal datang. Negara modern tetap penting, tetapi negara yang kuat justru membutuhkan masyarakat yang juga kuat. Budaya lokal memberi landasan psikologis dan moral bagi ketangguhan semacam itu. ([World Bank](#))

Akan tetapi, pembangunan negara tidak bisa berhenti pada bonding. Ikatan internal yang kuat dapat menjadi eksklusif bila tidak dibarengi kemampuan menjembatani perbedaan. Karena itu, keberagaman budaya Indonesia menjadi sangat bernilai ketika ia juga melahirkan **bridging social capital**. Pengalaman hidup berdampingan dengan kelompok lain—berbeda bahasa, agama, adat, atau makanan—mendidik masyarakat untuk bernegosiasi, menerjemahkan, dan berkompromi. Dalam konteks Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan kebudayaan nasional pada dasarnya bekerja sebagai jembatan simbolik yang memungkinkan berbagai identitas lokal tetap hidup tanpa merusak persatuan. Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan sendiri mendefinisikan kebudayaan nasional sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Definisi ini sangat penting, sebab kebangsaan Indonesia dibangun bukan dengan meniadakan budaya daerah, melainkan dengan menghubungkan mereka. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Selanjutnya, budaya juga dapat memperkuat **linking social capital**, yakni jembatan antara warga dan negara. Pembangunan sering gagal bukan karena programnya salah di atas kertas, tetapi karena masyarakat tidak percaya pada institusi, atau institusi tidak memahami bahasa sosial masyarakat. Ketika negara hadir dengan penghormatan terhadap budaya lokal—misalnya melalui konsultasi yang bermakna, penggunaan bahasa yang dipahami warga, pelibatan tokoh adat, dan pengakuan atas pengetahuan setempat—hubungan vertikal menjadi lebih sehat. Warga merasa dilihat, bukan sekadar diatur. Kepercayaan terhadap negara pun meningkat. Dalam jangka panjang, kepercayaan vertikal ini menentukan keberhasilan banyak agenda pembangunan, dari vaksinasi dan pendidikan hingga konservasi sumber daya alam. ([UNESCO](#))

4. Kontribusi keberagaman budaya terhadap pembangunan nasional

4.1. Memperkuat kohesi sosial dan integrasi kebangsaan

Pembangunan negara memerlukan stabilitas sosial. Stabilitas yang dimaksud tentu bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi adanya rasa kebersamaan yang cukup kuat untuk menopang kerja kolektif. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kohesi nasional tidak mungkin dibangun dengan penyeragaman identitas. Ia harus dibangun di atas pengakuan. Ketika negara menghargai budaya lokal, masyarakat merasa identitasnya diakui dalam rumah bersama bernama Indonesia.

Pengakuan ini menciptakan legitimasi emosional terhadap negara. Orang tidak merasa menjadi tamu di negerinya sendiri. Dari sinilah integrasi nasional bertumbuh secara lebih sehat. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Sebaliknya, ketika kebudayaan lokal dipinggirkan, dicap kuno, atau hanya dipakai sebagai pajangan, lahir rasa keterasingan. Keterasingan sosial berpotensi berubah menjadi apati politik, ketidakpercayaan kepada negara, bahkan resistensi. Oleh sebab itu, pemajuan kebudayaan tidak boleh dipandang terpisah dari agenda persatuan nasional. Ia justru

merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa modernisasi tidak menimbulkan alienasi kultural. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu membuat warga memasuki modernitas tanpa harus kehilangan martabat budayanya. ([UNESCO](#))

Dalam konteks ini, kebudayaan nasional Indonesia perlu dipahami bukan sebagai budaya tunggal yang menggantikan budaya daerah, melainkan sebagai ruang interaksi dan sintesis antarkebudayaan. Definisi ini sudah ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 2017. Dengan pengertian demikian, nasionalisme Indonesia memperoleh basis sosial yang lebih kokoh. Nasionalisme tidak muncul dari abstraksi politik belaka, melainkan dari pengalaman saling berjumpa dan saling belajar di antara berbagai budaya Nusantara. Pembangunan negara yang berjangka panjang—termasuk cita-cita Indonesia Emas 2045—akan lebih realistis bila ditopang oleh nasionalisme yang berakar pada penghormatan terhadap keberagaman. ([Indonesian Defense Ministry](#))

4.2. Mendorong partisipasi warga dan tata kelola pembangunan

Salah satu indikator penting pembangunan yang sehat adalah partisipasi warga. Jalan desa yang dibangun tanpa partisipasi biasanya cepat rusak, sementara program sosial yang tidak dipahami masyarakat sering berhenti di tengah jalan. Keberagaman budaya dapat meningkatkan partisipasi karena ia menyediakan bahasa sosial yang akrab bagi warga. Di banyak tempat, keputusan bersama lebih mudah diterima bila dibicarakan melalui forum yang selaras dengan adat bermusyawarah setempat. Begitu pula program pemerintah lebih efektif jika disampaikan melalui tokoh yang dipercaya komunitas. Dengan kata lain, budaya menyediakan “saluran legitimasi” bagi pembangunan. (analysisfunction.civilservice.gov.uk)

Modal sosial yang bersumber dari budaya juga menurunkan biaya koordinasi. Dalam teori pembangunan, koordinasi adalah persoalan besar: bagaimana menggerakkan banyak orang untuk bertindak

konsisten menuju tujuan bersama. Di komunitas yang kepercayaannya rendah, setiap kebijakan membutuhkan pengawasan ketat, insentif tinggi, dan sanksi berlapis. Sebaliknya, dalam komunitas dengan modal sosial tinggi, sebagian besar koordinasi berlangsung melalui norma bersama. Orang patuh bukan semata karena takut dihukum, melainkan karena merasa bertanggung jawab. Bagi negara berkembang dengan sumber daya administratif terbatas, ini adalah aset yang sangat besar.

[\(World Bank\)](#)

Penting pula dicatat bahwa arah pembangunan Indonesia menuju 2045 sangat menekankan kolaborasi. Buku Bappenas tentang visi Indonesia 2045 menegaskan adanya bab khusus mengenai transformasi tata kelola dan kolaborasi, serta bahwa kesadaran tentang pentingnya kolaborasi telah menjadi pemahaman bersama para pemangku kepentingan.

Kolaborasi semacam itu tidak bisa berdiri di ruang hampa; ia memerlukan kepercayaan, norma bersama, dan kemampuan bekerja lintas aktor. Semua itu adalah inti dari modal sosial. Maka, ketika kita berbicara tentang reformasi tata kelola, kita sesungguhnya juga sedang berbicara tentang kebutuhan memperkuat fondasi budaya yang mendukung kolaborasi.

4.3. Menggerakkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan kewirausahaan budaya

Salah satu sumbangan paling terlihat dari budaya bagi pembangunan adalah pada ranah ekonomi. Namun, pembacaan ekonomi budaya jangan dibatasi pada pariwisata semata. Budaya menciptakan rantai nilai yang luas: kerajinan, fesyen, kuliner, pertunjukan, musik, film, desain, penerbitan, ritual publik, pengobatan tradisional, hingga ekonomi digital berbasis konten lokal. Warisan budaya yang kuat menyediakan identitas diferensial bagi produk. Dalam pasar global yang semakin homogen, identitas lokal justru menjadi sumber daya saing. Produk yang memiliki

cerita budaya cenderung memiliki nilai tambah simbolik dan emosional yang lebih besar. ([UNESCO](#))

Kasus batik adalah contoh yang sangat jelas. UNESCO menekankan bahwa teknik, simbolisme, dan budaya yang menyertai batik meresap dalam kehidupan orang Indonesia. Ini menunjukkan bahwa batik bukan komoditas biasa, melainkan ekosistem budaya. Ketika dikelola baik, ekosistem itu menghidupkan perajin, desainer, pedagang kain, sektor pendidikan, festival budaya, dan industri kreatif. Nilai ekonomi batik lahir justru karena ia memiliki kedalaman budaya, bukan walaupun ia budaya. Di sini tampak bahwa pelestarian dan pemanfaatan tidak harus saling bertentangan; keduanya dapat saling menguatkan jika dilakukan dengan adil dan berbasis komunitas. ([ICH UNESCO](#))

Begitu pula dengan jamu, gamelan, pinisi, kolintang, wayang, kebaya, dan pantun. Elemen-elemen ini mempunyai potensi tidak hanya sebagai warisan simbolik, tetapi juga sebagai sumber inovasi ekonomi, pendidikan seni, diplomasi kreatif, dan kerja komunitas. Pengakuan UNESCO atas 16 elemen budaya Indonesia memperlihatkan bahwa banyak kekayaan Nusantara mempunyai daya resonansi lintas negara. Dalam konteks pembangunan, pengakuan internasional ini dapat meningkatkan reputasi, membuka pasar, memperluas jejaring kolaborasi, dan mendorong kebanggaan generasi muda terhadap budaya lokal. Namun, manfaat ekonomi itu baru sehat bila pemilik budaya memperoleh posisi utama dan tidak tersingkir oleh komersialisasi eksternal. ([ICH UNESCO](#))

Bappenas bahkan menampilkan budaya sebagai bagian dari promosi masa depan Indonesia. Pada Expo 2025 Osaka, Bappenas menyatakan bahwa Paviliun Indonesia mengintegrasikan alam, budaya, dan masa depan; bahkan National Day Indonesia diharapkan menjadi selebrasi kebudayaan sekaligus wadah promosi investasi menuju Indonesia Emas 2045. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik diplomasi ekonomi

kontemporer, budaya diposisikan bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari narasi daya tarik nasional. Negara yang pandai mengelola budaya dapat meningkatkan soft power sekaligus menarik investasi dan kerja sama internasional. (bappenas.go.id)

4.4. Memperkaya pendidikan, karakter, dan pembangunan manusia

Pembangunan negara pada akhirnya bertumpu pada kualitas manusianya. Karena itu, hubungan antara budaya dan pendidikan sangat penting. Budaya membentuk karakter jauh sebelum kurikulum formal bekerja. Anak belajar menghormati orang tua, berbagi, berbicara sopan, memahami peran komunitas, dan merawat lingkungan melalui praktik budaya sehari-hari. Dalam perspektif pembangunan manusia, ini berarti budaya berkontribusi pada pembentukan habitus sosial yang menopang pembelajaran formal. Sekolah yang mengabaikan konteks budaya murid sering kali gagal menjangkau pengalaman hidup mereka; sebaliknya, pendidikan yang berpijak pada budaya lokal lebih mudah menumbuhkan rasa percaya diri dan keterlibatan belajar. ([UNESCO](http://unesco.org))

Data Badan Bahasa memperlihatkan secara menarik bahwa pembelajaran dengan bahasa daerah pada tingkat awal terbukti meningkatkan pemahaman literasi, terutama bagi anak-anak di daerah 3T. Temuan ini sangat penting. Ia menegaskan bahwa bahasa ibu bukan hambatan bagi kemajuan, melainkan jembatan awal menuju penguasaan literasi. Dalam pembangunan pendidikan, pendekatan yang sensitif budaya justru memperkuat efektivitas belajar. Artinya, menjaga bahasa daerah bukan hanya proyek pelestarian identitas, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan manusia yang lebih cerdas dan inklusif.

([Kemendikdasmen](http://kemendikdasmen.go.id))

Di samping itu, keberagaman budaya menyediakan sumber bahan ajar yang kaya: cerita rakyat, musik tradisional, permainan lokal, kearifan ekologis, teknik kerajinan, dan etika komunitas. Bila dimasukkan secara kreatif ke dalam pendidikan, semua ini dapat memperkuat pembentukan

karakter, kreativitas, dan kebanggaan kebangsaan. Dalam masyarakat global yang serba cepat, generasi muda mudah mengalami keterputusan identitas. Pendidikan berbasis budaya membantu mereka masuk ke dunia modern tanpa menjadi tercerabut dari akar. Hal ini penting bukan hanya untuk alasan emosional, tetapi juga untuk membangun warga negara yang percaya diri dan tidak inferior dalam pergaulan global.

([UNESCO](#))

4.5. Mendukung keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan

Banyak komunitas adat dan lokal di Nusantara menyimpan pengetahuan ekologis yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan alam. Pengetahuan tersebut tercermin dalam aturan adat, ritus musim, teknik bertani, pola menangkap ikan, pengelolaan air, sampai larangan-larangan tertentu atas eksploitasi berlebihan. Walaupun tidak semua pengetahuan lokal selalu ideal, banyak di antaranya memuat prinsip keberlanjutan yang bernilai bagi pembangunan masa kini. Dalam era perubahan iklim dan krisis lingkungan, negara justru perlu belajar dari kebijaksanaan ekologis komunitas. UNESCO sendiri menekankan peran lintas-sektor budaya bagi pembangunan berkelanjutan dan transisi lingkungan. ([UNESCO](#))

Di sini budaya berfungsi sebagai modal sosial karena ia menciptakan norma pengelolaan bersama atas sumber daya. Ketika masyarakat memandang hutan, laut, sungai, atau tanah bukan sekadar komoditas individu, tetapi ruang hidup komunal yang harus dijaga, maka lahir disiplin kolektif. Bagi negara, ini sangat berharga. Pengawasan birokrasi saja tidak cukup untuk melindungi ekosistem yang luas. Perlindungan yang berkelanjutan memerlukan norma lokal yang hidup. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan lebih mudah berhasil ketika kebijakan negara bertemu dengan etika budaya masyarakat. ([World Bank](#))

5. Tantangan dalam mengubah keberagaman budaya menjadi modal sosial produktif

Meski potensinya besar, keberagaman budaya tidak otomatis menjadi modal sosial yang mendukung pembangunan. Ia dapat gagal berfungsi ketika masyarakat terjebak dalam prasangka, ketimpangan, atau politisasi identitas. BPS sendiri pernah mengingatkan bahwa perubahan komposisi suku dapat menjadi potensi konflik sosial, ekonomi, dan politik bila tidak dikelola dengan baik. Artinya, keberagaman yang tidak diiringi institusi adil dan ruang dialog bisa berubah dari sumber kekayaan menjadi sumber friksi. Karena itu, modal sosial memerlukan desain kelembagaan yang sehat. Kepercayaan tidak lahir hanya dari budaya, tetapi juga dari keadilan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan berikutnya adalah komodifikasi budaya yang berlebihan. Ketika budaya hanya dilihat sebagai alat promosi wisata atau komersialisasi pasar, pemilik budaya bisa tersingkir dari nilai tambah yang dihasilkan. Yang terjadi kemudian adalah ekstraksi simbolik: budaya dipertontonkan, tetapi komunitasnya tetap miskin; motif dipakai secara massal, tetapi perajinnya tidak sejahtera; ritus dipertunjukkan, tetapi maknanya terlepas dari komunitas. Pembangunan budaya yang sehat harus menghindari pola semacam ini. Pemanfaatan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan, pengembangan, dan pembinaan, persis sebagaimana ditegaskan UU Pemajuan Kebudayaan. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Tantangan lain adalah homogenisasi akibat modernisasi dan arus digital. Arus media yang kuat cenderung memusat pada budaya dominan, sementara banyak budaya lokal kehilangan ruang pewarisan. Data Badan Bahasa tentang 718 bahasa daerah sekaligus program revitalisasi 114 bahasa menunjukkan bahwa persoalan pelestarian bahasa bukan isu sepele. Bila bahasa melemah, maka melemah pula banyak unsur lain: cerita rakyat, pengetahuan lokal, istilah ekologis, tata kesopanan, dan memori kolektif. Hilangnya bahasa berarti berkurangnya salah satu fondasi modal sosial komunitas. Karena itu, digitalisasi perlu diarahkan

bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk memperluas ruang hidup budaya lokal. ([Kemendikdasmen](#))

Kita juga perlu waspada terhadap romantisasi budaya. Tidak semua praktik budaya secara otomatis adil, inklusif, atau relevan. Sebagian struktur budaya bisa memuat hierarki yang membatasi perempuan, kaum muda, atau kelompok tertentu. Karena itu, pendekatan pembangunan berbasis budaya tidak berarti menerima semua tradisi tanpa kritik. Yang diperlukan adalah sikap dialogis: menghormati akar budaya sekaligus membuka ruang pembaruan. Budaya harus menjadi sumber energi sosial bagi masa depan, bukan alasan untuk mempertahankan ketidakadilan. Pandangan UNESCO tentang budaya sebagai dimensi kebijakan yang *people-centered* dan *context-relevant* justru menegaskan perlunya pendekatan yang hidup dan reflektif, bukan beku. ([UNESCO](#))

6. Agenda strategis: mengelola budaya sebagai infrastruktur sosial pembangunan

Pertama, negara perlu menempatkan kebudayaan sebagai infrastruktur sosial, bukan sebagai sektor pinggiran. Selama ini, infrastruktur sering dipahami hanya sebagai jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi. Padahal tanpa infrastruktur sosial berupa kepercayaan, norma kerja sama, dan identitas kolektif, banyak infrastruktur fisik tidak berfungsi optimal. Karena itu, pemajuan kebudayaan harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang. Pandangan ini secara eksplisit sudah termuat dalam UU No. 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan prinsip itu ke dalam perencanaan dan anggaran yang konsisten. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Kedua, pembangunan budaya harus berbasis data yang baik. Kehadiran sistem pendataan kebudayaan terpadu dan platform "Budaya Kita" menunjukkan arah yang benar. Negara perlu terus memperbaiki inventaris warisan budaya, lembaga budaya, bahasa, manuskrip, ritus, dan praktik sosial secara partisipatif. Data bukan hanya untuk arsip, tetapi untuk kebijakan: daerah mana yang bahasanya paling rentan, komunitas mana yang membutuhkan dukungan regenerasi, rantai nilai budaya mana yang punya potensi ekonomi, dan area mana yang rawan konflik identitas. Dalam masyarakat yang sangat majemuk, kebijakan tanpa data budaya cenderung gagal membaca konteks.

(budaya.data.kemdikbud.go.id)

Ketiga, sekolah dan perguruan tinggi perlu menjadi ruang produksi pengetahuan budaya yang hidup. Revitalisasi bahasa daerah yang kini telah menjangkau seluruh provinsi menunjukkan bahwa negara sudah bergerak ke arah ini. Langkah berikutnya adalah memperluas integrasi budaya lokal ke dalam pedagogi, bukan hanya sebagai muatan tambahan, tetapi sebagai metode belajar. Sastra lokal dapat dipakai untuk literasi; musik tradisional untuk kreativitas; permainan rakyat untuk pembelajaran kolaboratif; pengetahuan lokal untuk sains kontekstual. Pendidikan semacam ini akan melahirkan generasi modern yang tetap berakar. ([Kemendikdasmen](#))

Keempat, negara perlu membangun model ekonomi budaya yang adil. Pengakuan UNESCO atas berbagai elemen budaya Indonesia memberikan peluang reputasi global yang besar. Tetapi peluang itu harus diterjemahkan ke dalam perlindungan hak komunitas, penguatan koperasi budaya, dukungan kepada perajin dan seniman, pembiayaan regenerasi, sertifikasi yang melindungi asal-usul, dan ekosistem pasar yang tidak eksploitatif. Budaya tidak boleh berhenti pada festival; ia harus bertransformasi menjadi kesejahteraan yang bermartabat. Ketika komunitas pemilik budaya menikmati manfaat ekonomi secara nyata, pelestarian menjadi masuk akal secara sosial. ([ICH UNESCO](#))

Kelima, pembangunan nasional perlu lebih sadar pada fungsi budaya bagi diplomasi dan pengaruh internasional. Bappenas menempatkan peningkatan kepemimpinan dan pengaruh internasional sebagai salah satu sasaran visi Indonesia 2045, dan praktik di Expo 2025 Osaka menunjukkan bagaimana budaya dipadukan dengan narasi masa depan serta promosi investasi. Ini menandakan bahwa budaya dapat menjadi wajah Indonesia di dunia: bukan hanya sebagai citra eksotis, tetapi sebagai ekspresi kreativitas, keberagaman, dan kemampuan hidup berdampingan. Soft power seperti ini penting dalam era ketika reputasi negara semakin menentukan peluang kerja sama ekonomi, pendidikan, dan teknologi.

Keenam, kebijakan pembangunan harus menumbuhkan bridging social capital antarbudaya. Artinya, negara tidak cukup hanya melindungi identitas masing-masing komunitas, tetapi juga harus menciptakan ruang pertemuan yang sehat: festival lintas daerah, pendidikan multikultural, pertukaran pemuda, kolaborasi seni, forum musyawarah antar komunitas, dan media publik yang adil. Dalam masyarakat majemuk, persatuan tidak dapat diasumsikan; ia harus diproduksi terus-menerus. Kebudayaan nasional Indonesia, sebagaimana dipahami sebagai hasil interaksi antarkebudayaan, membutuhkan ruang-ruang pertemuan nyata agar tidak berhenti sebagai konsep. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Penutup

Keberagaman budaya Nusantara adalah kenyataan dasar Indonesia. Ia hadir dalam ratusan kelompok suku, ratusan bahasa, berbagai sistem pengetahuan, seni, ritus, nilai, dan cara hidup yang tersebar di seluruh kepulauan. Namun, esai ini menegaskan bahwa keberagaman itu lebih dari sekadar fakta antropologis. Ia adalah sumber modal sosial yang amat berharga bagi pembangunan negara. Dari budaya lahir kepercayaan, norma kerja sama, solidaritas, kemampuan berpartisipasi,

penghormatan terhadap ruang bersama, serta daya tahan masyarakat menghadapi perubahan. Semua ini adalah prasyarat pembangunan yang kerap tidak terlihat dalam statistik ekonomi, tetapi sangat menentukan hasil akhirnya. (sensus.bps.go.id)

Karena itu, pembangunan Indonesia tidak boleh dibayangkan sebagai proyek teknokratis yang berdiri di atas tanah sosial yang kosong. Pembangunan selalu berlangsung di dalam dunia simbolik dan moral masyarakat. Jalan dibangun oleh manusia yang memiliki identitas; sekolah dijalankan oleh komunitas yang punya bahasa dan nilai; pasar bergerak melalui jaringan kepercayaan; kebijakan publik diterima atau ditolak berdasarkan legitimasi sosial. Dengan memahami budaya sebagai modal sosial, kita belajar bahwa memperkuat kebudayaan bukanlah tindakan nostalgia, melainkan strategi pembangunan yang rasional. Ia membantu negara menjadi lebih efektif, lebih inklusif, dan lebih manusiawi. ([UNESCO](https://www.unesco.org))

Pada saat yang sama, potensi budaya tidak boleh diromantisasi. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang adil, pendidikan yang kontekstual, ekonomi budaya yang bermartabat, perlindungan bahasa dan pengetahuan lokal, serta ruang dialog antarkelompok yang terus diperluas. Jika hal-hal ini dilakukan secara konsisten, maka keberagaman budaya Nusantara akan berfungsi bukan hanya sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai energi masa depan. Dalam kerangka itulah cita-cita Indonesia Emas 2045 memperoleh fondasi yang lebih kokoh: bukan semata-mata kekuatan pasar atau teknologi, tetapi kekuatan masyarakat yang saling percaya, saling terhubung, dan tetap berkepribadian dalam kebudayaan. ([Indonesian Defense Ministry](https://www.kemlu.go.id))

Pada akhirnya, negara yang maju bukanlah negara yang kehilangan keragamannya demi efisiensi, melainkan negara yang mampu mengubah keragaman menjadi kekuatan bersama. Indonesia memiliki syarat historis untuk itu. Konstitusi sudah memberi mandat, undang-undang sudah

memberi arah, data sudah menunjukkan betapa kayanya lanskap budaya kita, dan dunia pun mengakui banyak warisan kita. Tugas berikutnya ialah memastikan bahwa kekayaan budaya itu sungguh menjadi modal sosial yang hidup—yang menggerakkan pembangunan, memperdalam demokrasi, memperluas kesejahteraan, serta meneguhkan martabat Indonesia di tengah peradaban dunia. ([Indonesian Defense Ministry](#))

Berikut tambahan **glosarium** dan **daftar pustaka gaya APA 7** untuk naskah *“Keberagaman Budaya Nusantara sebagai Modal Sosial bagi Pembangunan Negara”*, berdasarkan sumber resmi yang telah diverifikasi, terutama dari BPS, Bappenas, UNESCO, Kemendikdasmen, World Bank, dan basis regulasi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Budaya

Keseluruhan sistem nilai, gagasan, praktik, simbol, bahasa, seni, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta diwariskan antargenerasi.

Kebudayaan Nasional

Keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia, yang membentuk identitas bersama sebagai bangsa.

Keberagaman Budaya

Keadaan sosial yang ditandai oleh adanya banyak suku, bahasa, adat, tradisi, ekspresi seni, dan sistem nilai dalam satu ruang kebangsaan.

Nusantara

Istilah yang merujuk pada keseluruhan ruang kepulauan Indonesia beserta warisan sejarah dan budayanya.

Modal Sosial

Jaringan, norma, nilai bersama, dan kepercayaan yang memungkinkan orang atau kelompok bekerja sama secara efektif demi tujuan bersama.

Bonding Social Capital

Ikatan sosial yang kuat di dalam kelompok sendiri, seperti keluarga, komunitas adat, atau kelompok etnis, yang menumbuhkan solidaritas internal.

Bridging Social Capital

Jembatan sosial yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda sehingga memungkinkan dialog, kerja sama, dan toleransi antarkomunitas.

Linking Social Capital

Hubungan sosial vertikal antara masyarakat dengan lembaga yang memiliki otoritas atau sumber daya lebih besar, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi nasional.

Kohesi Sosial

Tingkat keterikatan, rasa memiliki, dan solidaritas yang membuat masyarakat mampu hidup tertib, damai, dan saling mendukung.

Gotong Royong

Nilai dan praktik bekerja bersama secara sukarela demi kepentingan kolektif, yang menjadi salah satu ciri penting kehidupan sosial Indonesia.

Kearifan Lokal

Pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dalam komunitas tertentu sebagai hasil pengalaman historis mereka dalam mengelola kehidupan sosial dan lingkungan.

Warisan Budaya Takbenda

Praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, ritus, seni pertunjukan, tradisi lisan, dan kebiasaan sosial yang diakui sebagai bagian dari warisan hidup masyarakat.

Revitalisasi Bahasa Daerah

Upaya sistematis untuk melindungi, menghidupkan kembali, dan mewariskan bahasa daerah kepada generasi muda melalui pendidikan, komunitas, dan kegiatan budaya.

Ekonomi Kreatif

Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, pengetahuan, identitas budaya, dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

Diplomasi Budaya

Pemanfaatan budaya sebagai sarana membangun citra, pengaruh, dan hubungan baik antarbangsa.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Inklusivitas

Prinsip pembangunan yang menjamin seluruh kelompok sosial memperoleh ruang, pengakuan, dan manfaat secara adil.

Tata Kelola

Cara lembaga, negara, dan masyarakat mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan menjalankan kebijakan secara efektif dan akuntabel.

Daftar Pustaka (APA 7)

Analysis Function. (2021, July 13). *Social capital harmonised standard*. (analysisfunction.civilservice.gov.uk)

Badan Pusat Statistik. (2015, November 18). *Mengulik data suku di Indonesia*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](https://www.bps.go.id))

*Rudy C Tarumingkeng: Keberagaman Budaya Nusantara sebagai
Modal Sosial bagi Pembangunan Negara*

Badan Pusat Statistik. (2021, January 21). *Hasil sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Sensus penduduk 2020.* (sensus.bps.go.id)

Grootaert, C. (1998, April). *Social capital: The missing link?* (Social Capital Initiative Working Paper No. 3). World Bank. ([World Bank](#))

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, March 1). *Wamendikdasmen mendukung revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya pelestarian identitas bangsa.* ([Kemendikdasmen](#))

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Budaya Kita.* (budaya.data.kemdikbud.go.id)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Menuju Indonesia emas: Refleksi dan visi pembangunan 2005–2045.* Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, April 9). *Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka: Sebuah perjalanan melintasi alam, budaya, dan masa depan.* (bappenas.go.id)

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.* ([BPK Regulation](#))

UNESCO. (n.d.). *Indonesia.* Intangible Cultural Heritage. ([ICH UNESCO](#))

UNESCO. (n.d.). *Indonesian batik.* Intangible Cultural Heritage. ([ICH UNESCO](#))

UNESCO. (2023, May 11). *Thematic factsheet: Culture & sustainable development.* ([UNESCO](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Keberagaman Budaya Nusantara sebagai
Modal Sosial bagi Pembangunan Negara*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 9 Maret 2026
Prompting on Writer's account (Rudy C Tarumingkeng)

<https://chatgpt.com/c/69aeaf84-ce58-8399-87ec-eeecdcbd66738>